

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Abu Sayyaf merupakan kelompok bersenjata yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina. Kelompok tersebut menyandera 10 warga negara Indonesia yang sedang berlayar menuju Filipina. Penyanderaan tersebut berujung pada permintaan tebusan dalam pembebasan sandera. Namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mengirimkan pasukan TNI ke Filipina, namun tidak disetujui oleh negara Filipina.

Penulis tertarik untuk membahas dilema terkait upaya Indonesia dalam membebaskan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dilema tersebut.

Oleh karena itu penulis menyusun skripsi dengan judul **“Upaya Indonesia Dalam Penyelamatan Sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf”**

B. Latar Belakang Masalah

Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional tidak akan terlepas dari isu keamanan internasional. Sejak dahulu, keamanan internasional telah menjadi isu vital yang kerap menarik perhatian masyarakat internasional. Keamanan internasional kembali mencuat menjadi isu vital dalam pandangan dunia internasional pasca serangan terorisme pada gedung *World Trade Center* yang terjadi pada 11 September 2001. Pasca Amerika Serikat yang sejak dulu dipandang sebagai negara *superpower* menjadi target dalam peristiwa penyerangan teroris, Amerika Serikat mengajak masyarakat internasional untuk memerangi

terorisme secara besar-besaran. Sejak saat itulah isu keamanan internasional kembali hangat untuk diperbincangkan.

Dewasa ini, Indonesia kerap digemparkan oleh isu – isu terorisme. Tidak hanya dari sektor internal seperti munculnya kelompok pendukung ISIS tetapi juga dari pihak eksternal seperti yang terjadi pada Maret 2016 silam dimana Warga Negara Indonesia menjadi sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Abu Sayyaf merupakan kelompok radikal, dimana gerakan ini selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Para sandera, merupakan 10 Anak Buah Kapal (ABK) tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 milik Indonesia. Pada akhir Maret, kapal tersebut berlayar dari Kalimantan Selatan dengan tujuan Filipina. Kapal tersebut dirompak di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan, ketika sedang menarik Tongkang yang sarat dengan 7.000 ton batu bara.¹

Hal tersebut tentu menjadikan pemerintah Indonesia mengalami dilema dalam mengambil sikap terkait bagaimana upaya pembebasan sandera di Filipina mengingat lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas negara Filipina. Sebelumnya Indonesia pernah dihadapkan dengan kasus yang sama pada 2011 lalu, yakni penyanderaan WNI di Somalia. Dalam kasus tersebut pemerintah melakukan operasi tanpa berkoordinasi dengan aparat setempat karena tidak ada pemerintahan yang efektif di Somalia. Selain itu, Indonesia juga pernah terlibat dalam operasi Woyla di Bangkok, Thailand pada 1981. Dimana pembajakan tersebut memiliki kemiripan, yakni penyanderaan WNI berada di luar wilayah Indonesia dan adanya pemerintahan yang efektif di negara tersebut. Namun

¹ “Upaya Terbaik Bebaskan Sandera” - <http://presidenri.go.id/maritim/upaya-terbaik-bebaskan-sandera.html> (diakses pada 1 Oktober 2016)

dalam kasus Woyla, para pembajak, pesawat yang dibajak dan sandera tidak terkait dengan Thailand. Maka dari itu otoritas negeri gajah putih ini tidak melaksanakan kewenangannya dan mengizinkan Indonesia untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Dalam kasus ini, meskipun sandera merupakan warga negara Indonesia, namun dalam hal ini konstitusi Filipina melarang keterlibatan militer asing di wilayah teritorinya. Dalam konstitusi Filipina, tidak diizinkan adanya kekuatan militer (negara lain) tanpa adanya perjanjian. Menurut juru bicara Pasukan Militer Filipina, Kolonel Restituto Padilla, hal ini merujuk pada pasal XVIII, ayat 25 dari konstitusi tahun 1987 yang secara eksplisit melarang pangkalan militer asing di Filipina.² Keadaan ini tentu membuat Indonesia mau tidak mau menghormati kedaulatan negara Filipina, setiap langkah yang diambil harus merupakan keputusan bersama.

Kelompok bersenjata Abu Sayyaf mengancam akan membebaskan sandera dengan syarat adanya uang tebusan sebesar 50 peso atau sekitar Rp. 15 Milyar. Kejadian yang sama pernah terjadi pada 30 September 2000, dimana Abu Sayyaf menyandera 3 orang warga negara Malaysia di Resort Pantai Pasir, Sabah, dengan menggunakan sebuah *speedboat*. Lalu penyanderaan berakhir pada 2001, ketika Abu Sayyaf dikabarkan telah menerima tebusan 15 juta dollar dari pemerintah Filipina.³ Adanya tenggat waktu yang diberikan Abu Sayyaf makin menimbulkan kegentingan di benak keluarga korban. Munculnya kabar bahwa

² <http://www.beritasatu.com/dunia/357614-indonesia-diminta-kedepankan-bantuan-diplomatik-untuk-selamatkan-10-wni-di-filipina.html>

³Rommel C. Banlaoi. 2005. *Maritime Terrorism in Southeast Asia*. Yogyakarta : Jurnal HI UMY. Hal 62-80

salah satu sandera berkewarganegaraan lain telah dipenggal membuat pemerintah Indonesia semakin terdesak. Keluarga para korban menginginkan tebusan diberikan dengan alasan keselamatan keluarga mereka, sedangkan pemerintah Indonesia tentu tidak ingin mengambil langkah tersebut dikarenakan harga diri bangsa. Sebagai sebuah negara tentu seharusnya tidak mengikuti kemauan pembajak.

Setiap keputusan tentu memiliki resiko. Apabila pemerintah Indonesia mengabdikan keinginan pembajak tersebut berupa uang tebusan untuk membebaskan para sandera, maka dikhawatirkan hal tersebut justru dimanfaatkan untuk membuat kejadian penyanderaan WNI kembali terulang. Selain itu, kita sebagai orang yang tidak mengerti sepak terjang kelompok Abu Sayyaf tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan uang tersebut. Sebagai sebuah kelompok bersenjata, mereka tentu membutuhkan senjata sebagai alat untuk melindungi diri. Darimana mereka memperoleh dana untuk membeli senjata tentu menjadi alasan pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menyetujui opsi tebusan.

Tentara Filipina dengan usahanya terus berusaha menyelamatkan sandera. Beberapa kali operasi penyergapan dilakukan dengan hasil terbunuhnya beberapa militan dan menewaskan beberapa orang tentara Filipina. Jika dilihat dari keadaan dan situasi pada saat seperti itu, rencana pengiriman tentara Indonesia memang tidaklah tepat. Selain sandera berada di wilayah otoritas Filipina, dikhawatirkan pengiriman tentara hanya akan memicu munculnya korban baru karena kelompok Abu Sayyaf merasa terancam akan kehadiran mereka. Namun meskipun begitu,

pemerintah tetap berupaya membebaskan para sandera melalui jalur diplomasi, dengan dibantu oleh pemerintah Filipina.

Penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 warga negara Indonesia mendapat perhatian serius dari presiden Indonesia. Upaya pembebasan mereka pun terus dilakukan dengan berbagai strategi yang disiapkan. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan usaha yang terbaik dalam membebaskan para sandera.

C. Rumusan Masalah

Dalam proposal skripsi ini, pembahasannya memfokuskan penjelasan mengenai langkah dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI di Filipina dari Kelompok Abu Sayyaf. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana upaya Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf ?

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian tentang upaya Indonesia dalam pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan penulis yaitu :

1. Konsep *Total Diplomacy*

Diplomasi adalah seni dan praktek untuk melakukan negosiasi antar negara. Maksud diplomasi adalah membuat bangsa lain mendengarkan dan

menegosiasi hal yang kau inginkan dengan cara damai.⁴ Konsep diplomasi total bisa kita gambarkan melalui keterlibatan banyak pihak dalam suatu proses diplomasi. Diplomasi Total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan melibatkan seluruh komponen *stakeholder* dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan.⁵ Diplomasi kini mengalami evolusi dari pertama kali ditemukan pada era klasik. Aktivitas diplomasi kini sudah mengalami peningkatan peran seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Penerapan diplomasi tradisional (*first track diplomacy*) yang mana hanya melibatkan pemerintah dengan pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi dianggap sudah tidak lagi efektif. Diplomasi jalur pertama ini dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antar negara, oleh karena itu pemikiran diplomasi berkembang dan meningkat hingga saat ini, hingga akhirnya muncullah konsep diplomasi total.

Jika sebelumnya diplomasi banyak dikaitkan dengan isu perang, tetapi kini sudah bergeser. Perang bukan berarti tidak ada, melainkan kemunculan isu lain seperti lingkungan, pariwisata terorisme, kesehatan dan hak asasi manusia menjadi sasaran diplomasi yang lebih menonjol. Menurut beberapa definisi diplomasi total, dapat dikatakan bahwa diplomasi total merupakan penggunaan seluruh kekuatan bangsa dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dimana diplomasi ini tidak hanya melibatkan negosiasi pemerintah antar pemerintah namun juga melibatkan peran masyarakat di dalamnya.

⁴ “Total Diplomacy, The Art of Winning Risk” (pdf) <https://www.scribd.com/document/132297015/Art-of-Winning-Risk> (diakses pada 14 November 2016)

⁵ “Visi Kementerian Luar Negeri” - <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/default.aspx> (diakses pada Sabtu 19 November)

Pentingnya keterlibatan masyarakat Internasional dalam diplomasi diawali dengan pecahnya peperangan di berbagai belahan dunia yang mana telah menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dirancang untuk mengatasi konflik yang terjadi di dunia internasional. Hal ini menjadi pelajaran kepada masyarakat internasional untuk tidak menggantungkan masalah perang dan damai kepada aktor pemerintah. Masyarakat yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dalam menyelesaikan kasus dengan cara pandang yang dimilikinya. Meskipun diplomasi total menggunakan beberapa komponen sumber daya yang berbeda, akan tetapi terkait satu sama lain dan saling berinteraksi untuk membangun kerjasama yang sinergis

Ehsan Honary dalam bukunya *Total Diplomacy* menjelaskan bahwa konsep diplomasi total adalah adanya akumulasi dari seluruh sumber daya, yakni :

1. Politik

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁶ Keberadaan politik masih mengambil porsi yang besar dalam hubungan antar negara. Sehingga tidak jarang, politik selain dijadikan instrumen untuk meningkatkan kerjasama, juga dijadikan instrumen untuk menyelesaikan konflik. “Politik secara umum merupakan proses resolusi konflik yang dilakukan melalui pembuatan keputusan oleh suatu kelompok (*Politics in general is a*

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

process of conflict resolution by which groups make decisions)”⁷ Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Politik adalah penggunaan kekuasaan dalam pencapaian kepentingan. Dengan penggunaan kekuasaan mereka memperoleh kemampuan untuk mengendalikan tindakan tertentu sesuai yang mereka inginkan.

Politik disini bisa berupa kesepakatan atau ancaman. Seperti contohnya, ancaman penggunaan nuklir dalam Perang Dingin sering digunakan untuk menekan lawan agar menyerah, hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan. Politik juga melibatkan diskusi guna mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang nantinya bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, Indonesia sedang memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, maka dari itu diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri. Politik yang dilakukan Indonesia dalam kasus ini tidak terlepas dari bagaimana Indonesia mencoba membangun hubungan yang baik dengan negara lain guna memperoleh bantuan dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam kasus pembebasan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Indonesia menggunakan kekuatan militernya hanya sebagai *deterrence power*, dimana militer hanya digunakan sebagai bentuk pencegahan tanpa digunakan secara langsung.

⁷ “Total Diplomacy, The Art of Winning Risk” (pdf)
<https://www.scribd.com/document/132297015/Art-of-Winning-Risk> (diakses pada 28 November 2016)

2. Ekonomi

Dalam hal ini sumber daya ekonomi berkaitan dengan upaya politik luar negeri. Ehsan Honary dalam bukunya menjelaskan sumber daya ekonomi tersebut memfokuskan pada pemberian insentif. Dimana hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan dengan cara memberikan dorongan untuk melihat respon masyarakat dan mencapai kepentingan. Dengan mengetahui faktor emosional yakni keserakahan dan ketakutan dalam diri masyarakat, kita bisa mengambil keuntungan dari adanya faktor alamiah tersebut. Proses negosiasi bisa dilaksanakan bila kedua pihak yang terlibat merasa mendapat keuntungan dari kesepakatan yang dibuat. Dan untuk memulai kerjasama. Indonesia memberikan insentif ekonomi kepada kelompok di Filipina sebagai bentuk negosiasi pembebasan 10 sandera. Indonesia paham bahwa problem utama di kalangan para pemberontak adalah rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya menyelesaikan permasalahan.

Menurut beberapa definisi diplomasi total, dapat dikatakan bahwa diplomasi total merupakan penggunaan seluruh kekuatan bangsa dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Termasuk disini beberapa sumber daya yang memungkinkan. Dimana diplomasi ini tidak hanya melibatkan negosiasi pemerintah antar pemerintah namun juga melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Total Diplomacy* adalah upaya untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk bernegosiasi dengan tujuan memperoleh apa yang diinginkan.

Dengan memperhatikan konsep diplomasi total tersebut, penulis mencoba menjelaskan mengenai akumulasi sumber daya yang ada, kiranya dapat membahas lebih lanjut mengenai Upaya Indonesia dalam Pembebasan Sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf.

2. Konsep *Multitrack Diplomacy*

Menurut Louise Diamond dan John Mc.Donald dalam bukunya *Multi-track diplomacy: A system Approach to Peace-3rd*, *Multi-track diplomacy* adalah sebuah konsep perwujudan perdamaian Internasional yang prosesnya melibatkan semua komponen. Semua komponen saling terkait seperti sebuah cobweb model, mulai dari kegiatan, individual, institusi dan komunitas yang lantas saling bekerjasama untuk mencapai sebuah dunia dalam perdamaian.⁸ Dalam dinamikanya, munculnya berbagai jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa interaksi formal, serta interaksi antar-pemerintah dengan perwakilan yang ditugaskan oleh negara masing-masing bukanlah metode yang selamanya efektif dalam mencapai kerjasama Internasional untuk menyelesaikan konflik ataupun menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, muncullah konsep diplomasi multi jalur yang terdiri dari 9 jalur, yaitu:

1. Yang pertama adalah jalur *government* atau pemerintah. Artinya proses perdamaian dilakukan melalui aktivitas resmi dan formal dari pemerintah. Seperti contohnya, pembangunan perdamaian dilakukan melalui proses

⁸Louis Diamond and John Mc.Donald, *Multi-track diplomacy: A system Approach to Peace-3rd*. (New York: Kumarian Press, 1996), hlm.5.

diplomasi resmi dengan melalui konsensus bersama yang dilakukan dalam Persatuan Bangsa-Bangsa.

2. Yang kedua yaitu *non-government*. Yang dimaksud disini adalah keterlibatan orang yang profesional, yang mampu menganalisa, mencegah, menyelesaikan, dengan berkomunikasi dan membangun hubungan baik dalam menghadapi permasalahan, oleh aktor-aktor bukan negara. Seperti contohnya beberapa konferensi yang diadakan guna mencari solusi atas isu-isu yang terjadi.
3. Jalur ketiga, yakni bisnis. Dimana dalam menciptakan perdamaian, digunakan jalur perdagangan yang juga dapat membawa keuntungan. Bisnis menjadi jalur yang berpotensi untuk mencapai *peacebuilding* melalui aspek ekonomi. Hubungan persahabatan melalui komunikasi informal juga dapat mendukung berbagai kegiatan dalam mewujudkan perdamaian. Seperti contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Cina dalam kesepakatan perdagangan bebas. Melalui kesepakatan tersebut tentu saja dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara, sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik di antara kedua negara melalui kerjasama yang dilakukan.
4. Jalur keempat, yakni melalui *private citizen* atau warga negara privat. Dalam jalur ini, pencapaian perdamaian dilakukan oleh warga negara secara personal yang ikut andil dalam berkontribusi di dalamnya. Aktivitas dengan jalur ini biasanya dilakukan dengan berdiplomasi yang dilakukan

oleh seorang warga negara melalui program pertukaran, Non Governmental Organization dan berbagai kelompok kepentingan.

5. Jalur kelima yakni penelitian atau pelatihan dan edukasi. Jalur ini menggunakan pembelajaran dalam perwujudan perdamaian. Terdapat tiga kajian di dalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), *think tanks* (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain, ini adalah sebuah program penelitian yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik serta fasilitas third-party yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program Doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi.⁹ Contohnya adalah program beasiswa yang mengirimkan pelajar selama kurang lebih satu bulan ke negara-negara tujuan untuk belajar lintas-budaya dan kritis terhadap isu yang sesuai dengan bidang pilihan pelajar tersebut.
6. Jalur keenam adalah aktivisme atau perwujudan perdamaian melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal disarmament, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah.¹⁰ Kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk protes, pendidikan, aturan, dukungan, dan pengawasan.

⁹ Louis Diamond and John Mc.Donald, *Multi-track diplomacy: A system Approach to Peace-3rd*. (New York: Kumarian Press, 1996), hlm.4.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 5

Contohnya adalah adanya protes suatu kelompok yang dilakukan karena adanya pelanggaran HAM tertentu.

7. Jalur ketujuh adalah agama. Dimana perdamaian coba diwujudkan melalui kepercayaan yang dianut. Adanya komunitas spiritual dan religius yang kegiatannya berorientasi pada perdamaian. Contohnya adalah adanya bulletin atau selebaran yang disebar oleh suatu gerakan yang atau orang yang berstatus ‘tinggi’ dalam agama untuk mengarahkan jemaat terhadap suatu isu. Sudut pandang agama dianggap mampu membuat kita menjunjung tinggi rasa untuk menciptakan adanya perdamaian dan menentang hal-hal terkait dengan kekerasan dan perang.
8. Jalur kedelapan adalah pendanaan. Dimana jalur ini dalam mewujudkan perdamaian adalah dengan melalui penyediaan aset. Hal ini biasanya berhubungan dengan sebuah yayasan maupun perorangan yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai perdamaian tersebut.
9. Jalur kesembilan adalah komunikasi dan media sebagai wujud perdamaian melalui informasi. Media yang berisikan opini semua orang dapat dijadikan sarana edukasi. Kita dapat menganalisa suatu isu dan mampu mengubah keadaan ketika opini publik telah terbentuk. Contohnya adalah siaran-siaran berita di televisi dan internet. Dengan adanya media, masyarakat bisa mengakses informasi dengan cepat dan dapat mendukung berbagai upaya atau kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada terciptanya perdamaian.

Kemudian penerapan dari seluruh jalur disini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dalam penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui alternatif jalur yang ada meskipun hanya menggunakan beberapa jalur saja. Konsep ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan Internasional, negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor yang dapat menyelesaikan masalah untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, diplomasi multi jalur yang ditawarkan dapat membuka kesempatan bagi mereka pihak non-government untuk ikut andil dalam mewujudkan dan membangun perdamaian demi mencapai kepentingan nasional.

E. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil hipotesa bahwa upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan WNI dari kelompok Abu Sayyaf adalah melalui diplomasi total, yakni :

1. Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Filipina
2. Pemerintah Indonesia membuka akses dengan pihak non-negara

F. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk :

1. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Mengetahui dilema yang terjadi antara pihak Indonesia dan Filipina terkait kasus pembebasan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni deskriptif analitik dimana dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai upaya Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf.

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Jenis dan Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yakni menggunakan data sekunder yaitu data-data yang ada dan diperoleh dari berbagai sumber, baik cetak, maupun elektronik yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penulisan ini. Selain itu, pencarian data juga dilakukan dengan membuka berbagai website di internet.

3. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data menggunakan konsep diplomasi total. Dari konsep tersebut bisa diperoleh langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait Teori Diplomasi yang ada.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini. Adanya batasan penelitian dimaksudkan agar penulisan tidak melebar pada aspek waktu maupun ke dalam permasalahan yang lain, sehingga bisa lebih fokus terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah hanya berfokus pada upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab 1 skripsi ini akan berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, yaitu mengapa penulis mengangkat judul ini untuk diteliti, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran (teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung skripsi), hipotesis, tujuan, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Bab II dari skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai Indonesia sebagai negara Maritim dan terkait dengan Politik Luar Negeri Indonesia.

BAB III : Dinamika penyanderaan terhadap WNI

BAB IV : Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf.

BAB V : Kesimpulan